

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM MENUNJANG KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANDUNG

Robby Adzan Maulana

NPP. 29.1140

Asdaf Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: maulanarobby815@gmail.com

ABSTRACT

Problem statement/background GAP : This study departs from the problem of dependence on financial assistance from the center providing a view of regional finances that are not managed properly which indicates that the financial independence of the Bandung City area is still low. In addition, it is also necessary to analyze the Regional Original Income (PAD) in the form of calculating the effectiveness ratio, the ratio of the degree of decentralization, the dependency ratio, and the independence ratio in describing how much the level of financial independence of the Bandung City area is. A region can be said to be self-sufficient if the regional expenditures for the administration of government affairs can be self-financed by the region originating from regional revenue sources. **Purpose :** The purpose of this study is to describe the causes of the lack of Regional Original Income (PAD) in Bandung. While the data used in this study is data from the Bandung City Budget Realization Report (LRA) for 2017-2020. The data collection techniques used are interviews with 6 people from the area of financial management in the city of Bandung and documentation with related documents. **Method :** This research method uses a qualitative approach with inductive thinking using several financial ratios, namely, the ratio of the degree of decentralization, the ratio of regional financial dependence, and the ratio of regional financial independence.

Results : The results of the ratio measurement obtained by taking the average results of the 4 fiscal years of the City of Bandung, namely the ratio of the degree of decentralization of 41.26% on fairly good criteria, the ratio of the degree of dependence 44.65% on the dependency criteria with high categories, and the ratio of financial independence 96.18% on the criteria that is delegative. The inhibiting factors that cause the less than the maximum of Regional Original Income (PAD) are the low PAD received, the less than the maximum income from BUMD and the existence of a national budget policy. Efforts to increase Regional Original Income (PAD) by simplifying systems and procedures for collecting regional taxes and levies, including strengthening the regulations that govern; Efforts made to overcome the lack of BUMD's contribution in increasing PAD are following up on laws and regulations, improving BUMD's institutions, conducting routine guidance and supervision in the running of BUMD management, and carrying out various activities to support its implementation by forming a BUMD coaching team; Efforts to overcome the occurrence of national budget politics are by re-coordinating related policies made and then requesting assistance task funds from the provincial government.

Keywords : Local Government, Regional Original Income, BUMD, Budget Politics

ABSTRAK

Permasalahan/Latar belakang (GAP) : Penelitian ini diambil dari Permasalahan adanya ketergantungan bantuan dana dari pusat tersebut memberikan pandangan tentang keuangan daerah yang tidak dikelola dengan baik yang menandakan bahwa masih rendahnya kemandirian keuangan daerah Kota Bandung. Selain itu juga diperlukan analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa perhitungan rasio efektivitas, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, dan rasio kemandirian dalam menggambarkan seberapa besar tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bandung. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila pengeluaran biaya belanja daerah untuk urusan penyelenggaraan pemerintahan dapat dibiayai sendiri oleh daerahnya yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah. **Tujuan :** Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penyebab kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Bandung tahun 2017-2020. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan 6 orang dari bidang pengelolaan keuangan daerah Kota Bandung dan dokumentasi dengan dokumen terkait. **Metode :** Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara berpikir induktif menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Hasil/Temuan : Hasil pengukuran rasio yang didapat dengan diambil rata-rata hasil dari 4 tahun anggaran Kota Bandung yaitu rasio derajat desentralisasi 41,26% pada kriteria yang terbilang baik, rasio derajat ketergantungan 44,65% pada kriteria ketergantungan dengan kategori tinggi, dan rasio kemandirian keuangan 96,18% pada kriteria yaitu delegatif. Faktor penghambat yang menyebabkan kurang maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu rendahnya PAD yang diterima, kurang maksimalnya pendapatan yang bersumber dari BUMD dan adanya politik anggaran nasional. Upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempermudah sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah termasuk memperkuat peraturan yang mengatur; Upaya yang dilakukan dalam mengatasi minimnya kontribusi BUMD dalam meningkatkan PAD adalah menindaklanjuti peraturan perundang undangan, perbaikan kelembagaan BUMD, melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin dalam berjalannya pengelolaan BUMD, serta melakukan berbagai kegiatan guna mendukung implementasinya dengan pembentukan tim pembinaan BUMD; Upaya Mengatasi terjadinya politik anggaran nasional yaitu dengan melakukan koordinasi kembali terkait kebijakan yang dibuat dan kemudian meminta dana tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, PAD, BUMD, Politik Anggaran

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur tentang hak dan kewajiban daerah. Salah satu dari hak dan kewajiban daerah tersebut menjelaskan tentang upaya pemerintah yang dapat dilakukan untuk menunjang kemandirian daerah yaitu dengan memungut pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi ini nantinya akan memberikan imbalan atau balasan secara tidak langsung dan tujuan dari pungutan tersebut yaitu untuk membangun daerah menjadi lebih baik dengan membiayai kebutuhan fasilitas-fasilitas daerah dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya, Dana Transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dikeluarkan pada setiap tahun anggarannya. Jumlah besaran dari dana transfer ke daerah berbeda juga pada tiap tahunnya dan dibagikan ke seluruh daerah dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan dalam

mendukung kemandirian daerah dalam mengelola keuangan untuk dapat mendukung pelaksanaan pemerintahan di daerah dengan tujuan menunjang kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan tabel besaran dana transfer yang diperoleh Kota Bandung:

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah | Dana Transfer | Lain-lain Pendapatan Yang Sah |
|-------|------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 2017 | 2.578.457.420.885 | 2.290.752.638.595 | 865.796.589.608 |
| 2018 | 2.571.591.786.199 | 2.427.237.815.833 | 941.167.821.386 |
| 2019 | 2.548.258.990.275 | 2.484.080.961.540 | 1.349.478.992.821 |
| 2020 | 2.063.783.773.736 | 2.396.293.332.377 | 1.183.885.182.346 |

Sumber : djpk.kemenkeu (data diolah oleh penulis, 2021)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa terjadinya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terjadi di setiap tahunnya yang menandakan bahwa semakin kurangnya pemerintah dalam mengelola potensi daerahnya, sedangkan sumber dari Pendapatan Lain-lain Yang Sah berupa kekayaan yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, dan pendapatan bunga dari meminjam uang di bank atau menyimpan uang di bank terus mengalami peningkatan. Namun Kota Bandung masih memiliki ketergantungan dengan bantuan dana dari pusat, sehingga dapat menutupi kekurangan dana yang dibutuhkan dari Pendapatan Asli Daerahnya (PAD).

Pemerintah Kota Bandung perlu memaksimalkan potensi daerahnya agar penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat sehingga nantinya akan digunakan pemerintah daerah untuk membiayai belanja pemerintahannya dalam melaksanakan urusannya tanpa adanya bantuan dari pusat. Berikut merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah dalam merealisasikan anggarannya.

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kota Bandung

| TAHUN | PAD | BELANJA | % |
|-------|-------------------|-------------------|--------|
| 2017 | 2.578.457.420.885 | 5.829.512.978.424 | 44,23% |
| 2018 | 2.571.591.786.199 | 6.114.449.093.123 | 42,05% |
| 2019 | 2.548.258.990.275 | 6.310.647.268.360 | 40,38% |
| 2020 | 2.063.783.773.736 | 5.374.019.732.054 | 38,40% |

Sumber : djpk.kemenkeu (data diolah oleh penulis, 2021)

Berdasarkan dari tabel di atas menjelaskan bahwa kontribusi Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah semakin menurun sekitar 2% setiap tahunnya. Dapat terlihat juga bahwa biaya yang digunakan oleh pemerintah Kota Bandung untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan memiliki perbandingan yang cukup besar dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Hal tersebut menandakan bahwa sumber pendanaan dari Kota Bandung masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan urusan pemerintahannya sehingga masih memerlukan bantuan dana dari pusat sebagai tambahan penerimaan daerah sehingga dapat menutupi kekurangan dana tersebut.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan yang terjadi, yang menjadi poinnya adalah adanya ketergantungan bantuan dana dari pusat tersebut memberikan pandangan tentang keuangan daerah yang tidak dikelola dengan baik yang menandakan bahwa masih rendahnya kemandirian keuangan daerah Kota Bandung. Selain itu juga diperlukan analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa perhitungan rasio efektivitas, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, dan rasio kemandirian dalam menggambarkan seberapa besar tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bandung. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila pengeluaran biaya belanja daerah untuk urusan penyelenggaraan pemerintahan dapat dibiayai sendiri oleh daerahnya yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah. Berdasarkan dari data dan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Menunjang Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung”**.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu tentang kinerja keuangan menggunakan berbagai jenis rasio. Penelitian dengan judul Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010-2014 yang ditulis oleh Dwi Purnamasari dan Isna Rodiyah pada tahun (2019) menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif (campuran) dengan teori dari Halim yaitu rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil dari rasio kemandirian yang telah dihitung menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki status kemandirian yang rendah atau berada pada pola hubungan konsultatif yaitu terbilang masih rendah atau kurang. Penelitian dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015 yang ditulis oleh Manasep Orocomna, Bonifasia Elitha Bharanti, dan Paulus K. Allo Layuk pada tahun (2016) dalam proses penyusunan penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai dasarnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Teluk Bintuni masih sangat kurang. Dapat dilihat bahwa Kabupaten Teluk Bintuni memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat. Penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon yang ditulis oleh Krest D Tolosang pada tahun (2018) penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif sebagai dasar dalam penyusunannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Tomohon.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Penulis menggunakan konsep teori rasio keuangan yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016) yang terdiri dari rasio derajat desentralisasi, rasio derajat ketergantungan, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Perbedaan lainnya adalah penulis fokus kepada pengelolaan PAD pada Pemerintah daerah Kota Bandung tahun anggaran 2017-2020.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang kemandirian keuangan daerah Kota Bandung tahun anggaran 2017-2020 dan faktor yang menjadi penghambat serta upaya Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif, karena penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan cara menganalisis permasalahan berdasarkan keadaan yang sebenarnya dengan tujuan agar dapat memperoleh data dan informasi sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti untuk memperoleh data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data Primer, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Kepala Sub Bidang Perencanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Kepala Sub bidang Anggaran Pendapatan BKAD Kota Bandung, Analis Pendapatan Daerah BKAD Kota Bandung, dan Sub Bidang Anggaran Belanja Pegawai dan Barang / Jasa BKAD Kota Bandung. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2017-2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017-2020, dokumentasi foto kegiatan di lapangan yang berkaitan dengan kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun analisisnya menggunakan teknik yang terdiri dari 3 komponen analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang kemandirian keuangan daerah Kota Bandung tahun 2017-2020 dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi. Teori tersebut terdiri dari rasio keuangan yaitu terdiri dari rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio derajat ketergantungan, rasio efektivitas PAD, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Adapun pembahasan dapat dilihat melalui subbab berikut.

3.1 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal menggambarkan kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD yang berguna untuk memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah. Rasio ini menerangkan mengenai derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin meningkat kemampuan pemerintah daerah saat menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan Rasio Desentralisasi Fiskal bisa diketahui bagaimana pemerintah memaksimalkan PAD menjadi sumber pendapatan terbesar bagi daerah. Rasio derajat desentralisasi menggambarkan

kontribusi PAD terhadap total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal ini APBD Kota Bandung. Berdasarkan hasil perhitungan derajat desentralisasi Kota Bandung dengan rata-rata 41,26%. Jika dilihat dalam skala interval berada pada skala 40,01-50,00. Dapat disimpulkan bahwa rasio derajat desentralisasi Kota Bandung tahun anggaran 2017-2020 berada pada kriteria yang terbilang baik. Dengan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Kota Bandung sudah baik dalam membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat, meskipun begitu Kota Bandung masih memiliki suatu keterikatan yaitu ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam membiayai urusan tersebut.

3.2 Rasio Derajat Ketergantungan

Rasio derajat ketergantungan daerah keuangan daerah menggambarkan seberapa besar ketergantungan keuangan daerah terhadap penerimaan dana transfer dari pusat. Perhitungan rasio derajat ketergantungan keuangan daerah didapat dengan melakukan perbandingan antara jumlah penerimaan pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah. Berdasarkan hasil perhitungan, Hasil perhitungan derajat ketergantungan keuangan daerah Kota Bandung rata-rata sebesar 44,65%. jika diukur dengan skala presentase derajat ketergantungan keuangan daerah berada pada skala 40,01-50,00. Dari skala tersebut dapat diartikan bahwa rasio derajat ketergantungan keuangan daerah Kota Bandung berada pada kriteria ketergantungan dengan kategori tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Keuangan Pemerintah Kota Bandung masih bergantung pada pendapatan transfer. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung bahwa Pendapatan daerah Kota Bandung masih rendah sehingga masih memiliki ketergantungan dengan dana transfer untuk mencukupi belanja pemerintahan. Hal ini disebabkan karena sumber pendapatan daerah Kota Bandung masih belum maksimal pemungutannya terutama terganggu pada saat corona sehingga kontribusi dari pendapatan asli daerahnya masih rendah yang menyebabkan ketergantungan keuangan daerah meningkat.

3.3 Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian keuangan digunakan sebagai indikator untuk mengukur seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan, urusan pemerintahan, dan pelayanan umum kepada masyarakat sebagai imbalan secara tidak langsung atas pembayaran pajak dan retribusi daerah yang dipungut sebagai penerimaan daerah serta untuk mengetahui kemampuan daerah dalam membiayai segala bentuk kegiatan pemerintahan baik itu pembangunan daerah, pelayanan masyarakat, maupun hal-hal lain yang menjadi urusan pemerintahan daerah. Rasio dihitung dengan membandingkan PAD dengan pendapatan lain yang berasal dari sumber lain, yakni bantuan pemerintah pusat dan provinsi maupun hibah. Rasio Kemandirian Keuangan daerah dapat menunjukkan pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah. Hasil dari perhitungan kemandirian keuangan daerah Kota Bandung rata-rata 96,18%. Jika diukur dengan skala interval maka Kota Bandung berada pada skala 75-100, sehingga dapat diartikan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bandung berada pada skala interval delegatif. Pola hubungan delegatif yaitu sudah tidak adanya campur tangan dari pemerintah pusat dalam hal membantu pengelolaan daerahnya. Walaupun sudah dapat terbilang mandiri, namun Kota Bandung masih tetap membutuhkan bantuan dana dari pusat untuk memenuhi belanja kegiatan pemerintahannya, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung masih belum dapat memenuhi belanja pemerintahannya.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian di atas diketahui bahwa kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung masih rendah yang disebabkan oleh 2 faktor, yaitu rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan minimnya pendapatan yang dihasilkan oleh BUMD terhadap kontribusi PAD. Kedua faktor tersebut yang menyebabkan keuangan daerah Kota Bandung masih bergantung dengan dana transfer dari pusat. Peranan dari PAD sangat berpengaruh besar terhadap kemandirian keuangan suatu daerah baik dilihat dari derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, sampai pada kemandirian keuangan daerah. Semua perhitungan dari rasio di atas itu dapat memperkuat pernyataan bahwa pentingnya sumber-sumber dari PAD sangat berpengaruh dalam menunjang kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan dari hasil perhitungan derajat desentralisasi Kota Bandung berada pada kriteria yang terbilang baik, Dengan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Kota Bandung sudah baik dalam membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat, meskipun begitu Kota Bandung masih memiliki suatu keterikatan yaitu ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam membiayai urusan tersebut. Adapun derajat ketergantungan keuangan daerah Kota Bandung berada pada kriteria ketergantungan dengan kategori tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Keuangan Pemerintah Kota Bandung masih bergantung pada pendapatan transfer. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah menyebabkan ketergantungan daerahnya menjadi tinggi dan akan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerahnya. Kemandirian keuangan Kota Bandung yang telah dilakukan melalui analisis rasio menggambarkan bahwa kemandirian keuangan Kota Bandung berada pada skala interval delegatif. Pola hubungan delegatif yaitu sudah tidak adanya campur tangan dari pemerintah pusat dalam hal membantu pengelolaan daerahnya. Walaupun sudah dapat terbilang mandiri, namun Kota Bandung masih tetap membutuhkan bantuan dana dari pusat untuk memenuhi belanja kegiatan pemerintahannya, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung masih belum dapat memenuhi belanja pemerintahannya.

I. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa hasil dari analisis rasio pada kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung masih terbilang belum mampu sepenuhnya dalam membiayai belanja daerahnya yang mencakup segala urusan kegiatan pemerintahan daerahnya dan ditemui berbagai faktor penghambat yaitu kurang maksimalnya pemungutan objek pajak dan retribusi yang tidak sesuai dengan target yang diharapkan, Aturan atau regulasi yang mengatur tentang sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kurang mengikat dan begitupun aturan mengenai sanksi yang diberikan, minimnya kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD, dan Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tersebut belum memberikan ruang yang luas kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik dengan diberlakukannya opsen pajak terhadap beberapa objek pajak.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Mahmudi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kinerja keuangan Pemerintah daerah Kota Bandung pada tahun lainnya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

II. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

III. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John, and Cheryl Poth. "Qualitative Inquiry Research Design." *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 2002.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah Seri Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahmudi, 2019. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- , *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UII Press Yogyakarta, 2019.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Orocomna, M., Bharanti, B. E., & Allo Layuk, P. K. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMANDIRIAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2010-2015. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 2(3). <https://doi.org/10.52062/keuda.v2i3.725>
- Purnamasari, D., & Rodiyah, I. (2019). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010 – 2014. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 5(1), 75. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i1.814>
- Sidik, Machfud. "Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori Dan Aplikasinya Di Indonesia)." *Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia*, 2002.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R%D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Tolosang, K. D. (2018). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA TOMOHON. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/20689>